

**PEMBERIAN ASIMILASI KARENA *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 10 TAHUN 2020**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh :

Wa Ode Wahyumi Widyaningsih

NIM.C93217064



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Wa Ode Wahyumi Widyaningsih

NIM : C93217064

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pemberian Asimilasi Karena *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Wa Ode Wahyumi Widyaningsih

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wa Ode Wahyumi Widyaningsih NIM: C93217064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 08 Februari 2021

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Syamsuri.

Syamsuri, M.HI

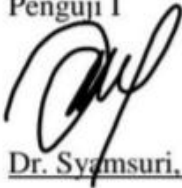
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wa Ode Wahyumi Widyaningsih NIM. C93217064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Syamsuri, M.HI.

NIP. 1972102920050110041

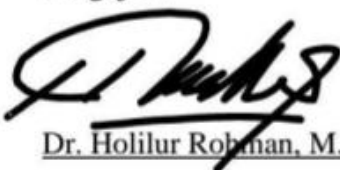
Penguji II



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

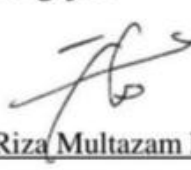
Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.HI.

NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, SH., MH.

NIP. 198611092019031008

Surabaya, 11 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wa Ode Wahyumi Widyaningsih
NIM : C93217064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : waodewahyumi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMBERIAN ASIMILASI KARENA *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 10 TAHUN 2020
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2021
Penulis

(Wa Ode Wahyumi Widyaningsih)

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan istilah Lapas adalah tempat binaan bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum (narapidana). Tujuan dari adanya sistem lembaga pemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 2 Pemasyarakatan yaitu antara lain untuk membina narapidana yang berstatus warga binaan agar menjadi manusia yang lebih utuh, menumbuhkan kesadaran pada warga binaan atas kesalahannya, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi pelanggaran hukum sehingga ketika dibebaskan dapat diterima kembali oleh masyarakat, ikut serta berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup sebagai warga negara yang taat aturan dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk dari realisasi hak integrasi bagi narapidana dengan masyarakat adalah dengan adanya pemberian asimilasi, yang merupakan salah satu program pembinaan disetiap Lapas yang ada di Indonesia.

Saat ini di Indonesia sedang mengalami kondisi terpuruk yakni ancaman sebuah wabah virus yang sering kita kenal dengan sebutan *Covid-19*. Pada awal merabaknya penyebaran *Covid-19* ini pada pertengahan Bulan Maret 2020, sehingga Indonesia berusaha untuk menanggulangi penyeberannya dengan berbagai cara. Pandemi *Covid-19* di seluruh dunia membuat Indonesia segera

[illegible]

Selain itu kebijakan lainnya yang diterapkan di Indonesia di berbagai sektor salah satunya adalah pada lembaga permasyarakatan. Kondisi lembaga permasyarakatan di Indonesia yang pada umumnya kelebihan kapasitas menjadi salah satu tempat bagi penyebaran *Covid-19*. Cara pencegahannya dengan menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* melalui pemberian asimilasi bagi narapidana pelaku tindak pidana umum, hal ini merupakan usaha yang dapat dilakukan. Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait penegakan nilai-nilai hak asasi manusia maka upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* ini dengan melalui asimilasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku dan keadilan serta memegang teguh prinsip kehati-hatian.³ Bentuk realisasi dari adanya pemberian asimilasi bagi warga binaan di masa pandemi *Covid-19* guna mencegah penyebarannya adalah adanya bentuk aturan baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Hak warga binaan berupa asimilasi merupakan hak bagi narapidana dan anak yang proses pembinaannya dilakukan dengan cara membaurkan tiap narapidana

³ I Ketut Sudarsana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19*, (Medan: t.p., 2020), 49

Daerah yang mengeluarkan narapidana dan tahanan terbanyak adalah Kanwil Jawa Timur dengan jumlah 5.818 Jiwa baik dari rutan maupun Lapas. Kanwil Jawa Timur adalah kanwil yang juga mengeluarkan narapidana perempuan terbanyak, yaitu 202 jiwa. Lapas yang termasuk dalam Kanwil Jawa Timur antara lain Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas I Madiun, Lapas Kelas IIA Kediri, Lapas Kelas IIA Jember, Lapas Kelas IIA Perempuan Malang, Lapas Kelas IIA Anak Blitar, Lapas Kelas IIA Pamekasan, Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Lapas Kelas IIB Mojokerto, Lapas Kelas IIB Jombang, Lapas Kelas IIB Ngawi, Lapas Kelas IIB Tulungagung, Lapas Kelas IIB Blitar, dan Lapas Kelas IIB Tuiban. Salah satunya yaitu Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang berada dibawah naungan Kanwil Jawa Timur ini juga menyumbang angka yang cukup banyak dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi.⁵ Melihat dari sumber internet terkait data sementara terhitung pada Bulan April 2020 akibat adanya virus corona Covid-19, sebanyak 26 warga binaan Lapas Kelas IIB Mojokerto, Jawa Timur dibebaskan. Mereka nantinya akan menjalani asimilasi rumah. Wahyu Susetyo selaku Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto mengatakan, 26 warga binaan yang dibebaskan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020. Dari 26 warga binaan yang menghirup udara bebas, 24 di antaranya laki-laki, satu

⁵ Hisyam Ikhtiar, *Analisis Kegiatan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat), 25

Dalam Hukum Pidana Islam pun mengatur terkait pemidanaan. Hukuman pemidanaan yang ditegakkan oleh syari'at Islam memiliki dua aspek, antara lain pencegahan dan pendidikan. Selain pencegahan dan pendidikan ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwasannya tujuan hukuman pemidaan dalam syari'at islam bertujuan untuk pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Abdul Qadir Audah mengungkapkan tujuan dari pemidanaan dalam Islam adalah menjauhkan kebodohan, menunjukkan kesesatan, menghindari perbuatan maksiat dan mengarahkan untuk menjadi manusia yang taat.⁷

Adapun tujuan hukum pidana Islam adalah menciptakan ketentraman antara individu dengan masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, berupa kerugian jiwa, harta maupun kehormatan. Dengan adanya hukuman ini dapat mendidik dan memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, agar seseorang tersebut dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Dalam islam pun memberikan hak-hak kepada mereka yang telah melanggar syari'at Islam. Selain hukum positif dalam hukum Islam pun mengenal adanya pengampunan. Pemaafan merupakan bentuk dari pengampunan atau pembebasan

⁷ Mokhammad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa’at*) Menurut Al-Mawardi” (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 1

[illegible]

Dengan demikian, guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto segera melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana dengan memberikan asimilasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara bertahap. Dari berbagai latar belakang masalah diatas penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberian Asimilasi Karena Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)”**

¹¹ Mokhamad Khomsin Suryadi, 29

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?
2. Bagaimana pemberian asimilasi berdasarkan Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
2. Untuk mengetahui pemberian asimilasi berdasarkan Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk :

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam memahami pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 serta prespektif dalam Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi penulis untuk penambahan wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca terkait penerapan hukum baik hukum positif maupun hukum islam dalam proses pemberian asimilasi di masa pandemi *Covid-19*.

Agar tidak terjadi salah paham dan mempermudah pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah atau kata yang ada didalam judul tersebut :

- [illegible]

Metodelogi penelitian adalah cara ilmiah dengan tujuan tertentu yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya serta digunakan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yaitu proses penelitian yang digunakan untuk memahami masalah pada manusia ataupun sosial dengan menggambarannya secara kompleks dan meyeluruh lalu disajikan dalam bentuk kata-kata, memberikan laporan secara rinci yang diperoleh dari narasumber, dan dilakukan dalam latar yang alamiah.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan yang ada terkait Pemberian Asimilasi Karena Alasan *Covid-19* di Lapas Kelas IIB Mojokerto yang selanjutnya dikaji dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.

¹⁷ Warul Walidin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press), 75

b. Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum tentang asimilasi dan pandemi *Covid-19* terdiri dari sub-sub bab antara lain latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari dua bab. Pertama menguraikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020. Kedua menguraikan tentang teori dalam hukum islam yakni *al-afwu* yang menjelaskan pengampunan dalam prespektif hukum islam.

Bab ketiga berisi data penelitian yang menjelaskan tentang data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Bab ini terbagi menjadi: (1) Profil Lapas, (2) Struktur Organisasi Lapas, (3) Fasilitas dan kegiatan Lapas, (4) Data narapidana beserta jenis pidananya yang mendapatkan asimilasi selama pandemi *Covid-19*, (5) Hambatan dalam pemberian asimilasi, (6) Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemberian asimilasi.

Bab keempat berisi analisis penelitian terkait pemberian asimilasi dari prespektif hukum islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.

Bab kelima menjadi penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya terkait isi pokok pembahasan tersebut dan memberikan saran untuk Lapas Mojokerto tentang isi penulisan skripsi ini.

1. Pengertian Pemaafan (*al-‘Afwu*)

Berdasarkan ensiklopedia Islam, secara etimologis kata '*afā*' atau '*al-ʿafw*' mempunyai arti hilang dan terhapus; pemaafan. Dalam fikih pembahasan kata ini berkaitan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. M. Quraish Shihab memaparkan perkembangan makna kata '*afā*'. Menurutnya, sebanyak 34 ayat kata '*afā*' ini tertuang dalam al-Quran. Awalnya kata '*afā*' ini berarti kelebihan, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada QS. al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan kepada kita agar senantiasa berfikir.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. Quraish Shihab pun menjelaskan, yang berlebih harus ‘diberikan’ sehingga ‘keluar’. Ungkapan tersebut bermakna bahwasannya apa yang awalnya ada di dalam menjadi berada diluar atau tidak di dalam, sehingga kata *al-’afw* maknanya mengalami perkembangan menjadi ‘keterhapusan’. Memaafkan berarti menghapuskan luka yang ada di dada atas kesalahan orang lain, sehingga hilang dari ingatan.²⁰

Makna 'Afwu (pemaafan) yaitu keinginan untuk memperoleh sesuatu, berarti dalam hal ini setiap hamba senantiasa diperhatikan oleh Allah SWT kemudian

²⁰ Umar Attamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Islam/Syariah Uin Alauddin Makassar 2013), 42

Berdasarkan penjelasan terkait istilah-istilah pengampunan dan pemaafan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan asimilasi istilah *syafa'at* dan *maghfiroh* tidak mempunyai keterkaitan.²²

Sebanyak 34 kali kata *al-'Afwu* terulang didalam al-Quran, 7 kali diantaranya membahas pemaafan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan seorang muslim mempunyai akhlak saling memaafkan adalah suatu hal yang penting. Apabila seseorang memberikan maaf atau tidak memberikan maaf terhadap orang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya akan memperoleh balasan dari Allah SWT yang setimpal, karena hakikatnya orang yang bertakwa kepada Allah SWT salah satunya mempunyai sifat *al-'Afwu* (memafkan). Dalam QS. Ali 'Imran: 134 menjelaskan bahwa apabila menghadapi seseorang yang berbuat kesalahan terhadapnya maka seorang muslim yang bertakwa akan menyikapinya dengan 3 cara, yaitu senantiasa menahan amarahnya, mudah memberikan maaf, dan senantiasa bersikap baik terhadap siapapun walaupun telah berbuat kesalahan kepadanya.²³

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa terdapat dua lafadz yang diartikan sebagai pemaafan dalam al-Qur'an, yaitu:

- al- 'Afwu* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178
- Kata *Shadaq* ada dalam surat al-Maidah ayat 45

Dalam ayat al-Qur'an tidak menjelaskan untuk meminta maaf terlebih dahulu, melainkan terdapat anjuran agar senantiasa memberikan maaf, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat Ali-Imran ayat 152 dan ayat 155, surat al-Maidah ayat 95 dan ayat 101. Salah satu dari ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan maaf sebelum diminta dan tidak menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah, karena bagi mereka yang tidak memberikan maaf tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT.²⁴

2. Dasar Hukum Pemaafan dalam Islam

- a. Al-Qur'an
 - 1) QS. An-Nisa: 149

²² Syaikh Ja'far Subhani, 2011, *Adakah Syafa'at dalam Islam Antara Pro dan Kontra*, Diterjemahkan dari buku asli Bahasa Arab “*Al-Syafa'ah*” Penerjemah Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 41

²³ Moh Khasan, Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan, *Jurnal at-Taqqadum*, Vol.9, No. 1, (Juli, 2017), 72

²⁴ Ibid., 77.

Makna dari ayat diatas adalah Allah SWT mengajak dan mengawali untuk senantiasa memberikan maaf dengan menyebutkan bahwa seorang mukmin selalu menunjukkan kebaikan atau menyembunyikannya. Begitu juga sebaliknya terhadap perbuatan yang buruk, dia terkadang memperlihatkan ketika meminta keadilan dari pelaku keburukan, atau memberikan maaf dan berlapang dada karena memberi maaf itu lebih baik. Sesungguhnya diantara sifat Allah adalah pemaaf terhadap hamba-hamba-Nya, meskipun Dia Maha Kuasa untuk memberikan siksaan kepada mereka.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan wewenang sepenuhnya kepada korban/keluarga korban dalam memberikan maaf, namun dalam melaksanakan pembalasan tersebut dilarang apabila melampaui batas. Maksud dari wewenang disini adalah wewenang korban/keluarga untuk meminta *qishas* atau memberikan pengampunan kepada pelaku pembunuhan tersebut, oleh karena itu

²⁶ <https://tafsirweb.com/677-quran-surat-al-baqarah-ayat-178.html>, (7 Desember 2020)

dalam prinsip hukum islam pembalasan bagi pembunuhan tersebut bukanlah dari pihak penguasa/hakim melainkan dari korban/keluarga korban. Oleh karena itu, penguasa/hakim tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa pemaafan adalah memaafkan *qishas* atau diyat dengan tidak meminta ganti rugi atau imbalan apapun dari pelaku tindak pidana. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian maaf terhadap diyat itu dapat dilakukan apabila adanya kerelaan dari pelaku tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan makna pemaafan adalah pemaafan *qishas* tanpa meminta imbalan apapun, sedangkan memaafkan *diyat* itu berarti perdamaian. Pihak yang berhak menyelenggarakan adanya perdamaian adalah pihak korban/keluarga korban atau pihak yang berhak atas *qishas* dan pemaafan. Terhapusnya *Qishas* juga dapat terjadi apabila mewariskannya kepada pihak keluarga korban. Memberikan maaf kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana lainnya merupakan perilaku yang sangat terpuji walaupun pelaku tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Dalam ayat lain Allah SWT juga menganjurkan kepada tiap umat manusia khususnya umat muslim untuk saling memaafkan dari pada harus membalas keburukan yang telah dilakukan oleh orang lain.²⁷

b. al-Hadist

Selain itu terdapat pula hadits yang menyatakan bahwasannya sifat meminta maaf dan memaafkan hendaknya dimiliki oleh seorang muslim apabila suatu tindak pidana tersebut memungkinkan untuk diberikan pemaafan. Aisyah r.a meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindar lakukan, sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”. (HR. Tirmizi)

Makna dari hadist diatas adalah landasan atau dasar hukum bagi seorang hakim maupun pihak yang mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu perkara apabila ragu ketika menilai suatu tindak pidana yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang akan diputuskannya. Oleh karena itu, seorang hakim maupun

²⁷ Devi Yuliana Ashar, *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)*, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2018), 32

penguasa diharuskan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara dan tidak semena-mena dalam memberikan pengampunan apabila suatu perkara telah diajukan ke pengadilan.²⁸

Madinah, Haji *Wada'*, peristiwa *Tha'if*, dan *Fathu Makkah*. Peristiwa inilah yang memberikan inspirasi dengan adanya perumusan Piagam Madinah (622 M).³²

Selain itu pada peristiwa Haji *Wada'* melalui khutbah wada'-nya, Rasulullah SAW lebih memperkuat dan memperjelas prinsip yang mendasar pada persamaan, rekonsiliasi, dan pemaafan antar sesama ummat. Selanjutnya pada peristiwa di *Thaif* dan *Fathu Makkah*, Rasulullah dalam upayanya untuk mengembangkan ajaran Islam menunjukkan ketulusan hatinya untuk memaafkan mereka dan tidak membalas apa yang telah dilakukan. Pada saat itu dakwah yang disampaikannya ditolak oleh para penduduk Makkah, selain itu Rasulullah juga berusaha mengajak penduduk *Thaif* untuk mengikuti ajaran Islam. Namun, usaha Rasulullah tidak hanya mendapatkan penolakan, tapi juga mendapat tentangan dan dilempar batu oleh pemuda Bani *Thaif* sehingga kaki Nabi berdarah.

Walaupun diperlakukan dengan tidak manusiawi Rasulullah masih senantiasa mendoakan mereka agar mendapatkan pengampunan dari Allah SWT walaupun Rasulullah mendapat tawaran untuk menghukum mereka dari malaikat Jibril. Rasulullah tetap memberikan maaf dan mendoakan mereka agar mendapat pengampunan dan hidayah dari Allah SWT. Sifat mudah marah, sakit hati, benci dan dendam ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan jasmani setiap manusia misalnya gangguan kejiwaan (setres) dan meningkatkan tekanan darah.³³

Dalam QS. as-Syuraa ayat 43 menjelaskan dalam islam juga memberikan gambaran tentang pentingnya moral yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika memberikan maaf kepada Mistah, seseorang yang memfitnah Siti 'Aisyah, walaupun Mistah dapat diberikan hukuman yang berat. Pemaafan merupakan sikap yang bernilai dan terkait dengan toleransi, sehingga mengabaikan kesalahan yang diperbuat orang lain, menghargai adanya perbedaan pendapat, dan memberikan maaf kepada segala sesuatu yang seharusnya dimaafkan. Allah SWT berfirman QS. as-Syuraa: 43 yang bermaksud:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

³² Ibid., 71

³³ Budi, "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah", *Harian Metro* (5 Juli 2018), 23

Artinya: "Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, scsungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan."³⁴

Rasulullah SAW mempunyai sifat pemaaf yang tidak mudah mempunyai rasa sakit hati apalagi pendendam walaupun sering mendapat perlakuan dalam berbagai bentuk perbuatan yang menyakitkan bahkan hingga mengancam nyawanya. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak pulang dari masjid setelah melaksanakan ibadah sholat dituduh oleh kaum kafir Quraisy, namun Baginda tidak pernah membalasnya. Begitulah karakter dimiliki oleh Rasulullah yang sudah selakyaknya diteladani oleh setiap manusia. Apabila ada orang yang meminta maaf, maka baginda langsung memberikan maaf kepada orang tersebut. Menjadi pemaaf memang membutuhkan jiwa yang besar karena orang yang memberikan maaf sementara dia ada dipihak yang benar merupakan bentuk kemuliaan untuk dirinya.³⁵ Allah SWT berfirman dalam QS. Surah al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: " Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."³⁶

Rasulullah SAW bersabda bahwa sifat pemaaf adalah iman yang paling utama: "Iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan." (Hadis riwayat Bukhari). Seseorang yang bertakwa kepada Allah dan akhlak yang disayangi oleh Allah SWT adalah memiliki sifat pemaaf. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari perbuatan yang salah, maka janganlah malu untuk memohon maaf, dengan demikian memohon maaf tidak melihat tempat dan dengan siapa. Allah SWT memiliki sifat mulia yaitu sifat Pemaaf, maka Allah akan senantiasa memberikan pengampunan bagi mereka yang mempunyai sifat pemaaf.³⁷

³⁴ <https://tafsirweb.com/9133-quran-surat-asy-syura-ayat-43.html>, (7 Desember 2020)

³⁵ Budi, "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah", *Harian Metro* (5 Juli 2018), 23

³⁶ <https://tafsirweb.com/2653-quran-surat-al-araf-ayat-199.html>, (7 Desember 2020)

³⁷ Budi, "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah", 23

a. Pemaafan dalam Jarimah *Hudud*

$$XX = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Berikut ketentuan-ketentuan tentang pemaafan pada jarimah *hudud*, antara lain:⁴⁰

- ### b. Pemaafan dalam Jarimah *Qishas-Diyat*

³⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Ta'zir)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 48

³⁹ Ahmad Dani, Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, (Mei, 2012), 474

⁴¹ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Permaafan dalam Pidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2018), 943

yang lain. Oleh karena itu, tiap manusia akan berulang kali memikirkan apabila akan berbuat kejahatan sebab hukuman yang didapatkan sebanding dengan perbuatannya.

Jika tidak ingin dipukul jangan memukul, begitu juga dengan membunuh, jika tidak ingin dihukum bunuh maka jangan membunuh. Sifat dari hukuman *qishas* ini adalah preventif sehingga dapat dicegah sebelum terjadinya kejahatan melihat hukuman yang didapatkan sebanding. Sebelum hakim memutuskan untuk mengeksekusi, pihak korban atau keluarganya diberikan hak sepenuhnya untuk membatalkan putusan hakim atau mencabutnya, karena korban atau keluarganya telah memberikan maaf atas tindakan pelaku kejahatan tersebut namun sebagai pengganti hukumannya pelaku harus membayar *diyat* sebagai penebus kejahatan yang telah dilakukan terhadap korban, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taura) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. ...”⁴²

Dalam Hukum Islam wewenang sepenuhnya dalam mengampuni/memaafkan *qishas* diberikan kepada korban/keluarga korban, baik dengan adanya imbalan berupa membayar denda (*diyat*) atau tidak meminta imbalan apapun namun hakim masih berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *qishas* karena tindak pidana pembunuhan erat kaitannya

⁴² <https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html>, (5 Desember 2020).

Jarimah *Ta'zir* merupakan jarimah yang ancaman hukumannya yaitu hukuman pengajaran (*ta'zir*) yaitu selain Jarimah *Hudud* dan Jarimah *Qishas-Diyat*. Dalam syari'at tidak ditentukan jenis-jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya yang termasuk dalam hukuman *ta'zir*.⁴⁵ Tujuan dari adanya sanksi *ta'zir* ini yaitu untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan itu merupakan tindakan yang tidak terpuji sehingga dia meninggalkan dan menghentikannya. Pendapat al-Mawardi terkait makna *ta'zir* yaitu sanksi atas perbuatan dosa yang ancaman hukumannya belum ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist yang bersifat pendidikan. Pemberian sanksi hukuman yang diterapkan dalam jarimah *ta'zir* ini beragam, antara lain:⁴⁶

- 1) Sanksi yang bersifat preventif (pendekatan), yaitu harus berdampak positif bagi orang lain sehingga perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain.
- 2) Bersifat represif, yaitu bahwa sanksi yang diberikan harus mempunyai dampak yang positif bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 3) Sanksi *ta'zīr* bersifat edukatif atau pendidikan, berarti sanksi yang diberikan harus menciptakan kesadaran bagi pelaku agar dapat merubah kehidupannya menuju yang lebih baik lagi, bukan karena takut terhadap hukuman namun takut untuk melakukan suatu kejahatan.

⁴⁶ Ahmad Dani, *Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam*, 481

- Sanksi *ta'zīr* yang sesuai dengan definisinya adalah yang berhubungan dengan hak kebebasan seseorang, seperti yang diterapkan adalah hukuman dan pengasingan. Terdapat perbedaan dikalangan para ulama terkait batasan yang digunakan dalam pemenjaraan, selanjutnya Ulil Amri menentukan batasan tersebut demi kemaslahatan dan kepastian hukum. Sanksi penjara yang tidak ada batas waktunya / seumur hidup dan sanksi penjara yang dibatasi apabila pelaku bertaubat. Pemenjaraan yang dibatasi apabila pelaku bertaubat ini mengandung pendidikan, seperti yang telah diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan Hak Warga Binaan bagi pelaku yang terbukti telah bertaubat sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada 3 tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu hukuman pidana harus terdapat unsur pencegahan, pendidikan, dan pengajaran.⁴⁸

Para fuqaha sepakat bahwa pemberian maaf harus atas dasar tuntutan kemaslahatan, dan apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan hak perseorangan maka yang mempunyai wewenang untuk memberikan maaf adalah perseorangan juga, sedangkan apabila tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah yang mempunyai wewenang untuk memberikan maaf hanya hakim. Namun apabila tindak pidananya campuran, jika dari pihak korban memberikan maaf maka tersisa hak Allah, dalam hal ini penghukumannya diserahkan kepada hakim. Pendapat al-Mawardi terkait dengan pemaafan antara lain:⁴⁹

⁴⁹ Ibid., 483

1. Pemberian Asimilasi karena Alasan *Covid-19*

Dalam usaha penanggulangan penyebaran Virus *Covid-19* ini, Kemenkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH.PK.01.01.01-04, yang isinya menjelaskan bahwasannya ketetapan tidak menerima tahanan baru di Rutan dan Lapas dan ditiadakannya kegiatan pelayanan kunjungan, dan juga permintaan penundaan kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan yang mulai diterapkan pada tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya, Kemenkumham juga menerbitkan SK yang mengatur tentang pengeluaran dan pembebasan arapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi selain itu juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Th. 2020 yang mengatur tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.⁵⁰

⁵⁰ Andreas Eno Tirtakusuma, Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan1 (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19), *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2020), 16

[illegible]

Pengawasan kepada warga binaan yang bebas karena program asimilasi ini dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Polisi Daerah setempat, apabila terdapat warga binaan yang telah bebas melakukan tindak pidana kembali setelah mendapatkan asimilasi segera dikembalikan ke Lapas dan langsung menjalani pidananya setelah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian setempat. Selain melakukan koordinasi dengan Kapolda, pihak Bapas juga berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan melengkapi dokumen warga binaan yang di bebas secara lengkap dan data setelah asimilasi *Covid 19*. Diharapkan koordinasi yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik, maka selalu berupaya dalam peningkatan pengawasan dan evaluasi kepada warga binaan yang dibebaskan melalui asimilasi. Usaha ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

[illegible]

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan bernomor M.HH.PK.01.01.01-04, yang pada intinya isi dari surat tersebut menjelaskan bahwasannya ketetapan penolakan kegiatan pelayanan kunjungan dan penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020, termasuk juga permintaan penundaan kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dan mengundang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁵²

⁵² Andreas Eno Tirtakusuma, Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan1 (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19), *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2020), 16

⁵³ <https://bphn.go.id/news/2020040911270059/BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19>, (2 Desember 2020)

Adanya kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 merupakan kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pertimbangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut berbunyi “Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran *Covid-19*”. Dalam proses pengawasan dan pembimbingan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan laporan pengawasan dan pembimbingan dilakukan secara daring (*online*). Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan, dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala divisi pemasyarakatan melakukan pengawasan dan bimbingan atas pelaksanaan Keputusan Menteri dan melaporkannya Kepada Dirjen Pemasyarakatan. Keputusan Menteri ini mulai diberlakukan sejak tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Dalam hal pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi, diharapkan agar para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Kapolda setempat agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan melengkapi dokumen administrasi warga binaan yang di bebaskan dengan baik dan juga data pasca asimilasi *Covid 19* agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, selalu dilakukan peningkatan pengawasan dan evaluasi kepada warga binaan yang di bebaskan melalui asimilasi dan integrasi, usaha ini berperan penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.⁵⁴

⁵⁴ <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020?tmpl=component&print=1>, (2 Desember 2020)

- a. Kesatu: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.
- b. Kedua: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak sebagaimana diktum Kesatu dilaksanakan melalui:

- [illegible]

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto atau dikenal dengan nama Lapas Mojokerto adalah salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan) yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Jawa Timur. Tugas Lembaga Pemasarakatan antara lain adalah untuk memberikan pembinaan dan perawatan kepada warga binaan yang bersifat administratif atau substantif. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto ini berlokasi di Jl. Taman Siswa No. 10, Dusun Mergelo, Desa Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto ini secara umum mempunyai kondisi bangunan yang masih memenuhi standart persyaratan sebagai Lapas. Dapat terlihat dari segi keamanan, tembok bangunan dan tembok keliling yang masihkokoh, pos pengamanan dalam kondisi baik. Lapas Kelas IIB Mojokerto ini sudah berdiri sejak tahun 1918. Kondisi Geografis Lapas Kelas IIB Mojokerto yakni memiliki luas 7.372 m² dengan luas bangunan 1.869 m² dan mempunyai daya tampung 260 jiwa. Adapun visi dari Lapas Mojokerto ini yaitu: Menumbuhkan satu kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan terhadap warga binaan pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang diwujudkan oleh Lapas Mojokerto diantaranya:

1. Melaksanakan perawatan Tahanan
2. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya tujuan dari adanya Lapas Mojokerto ini antara lain:

1. Untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya
2. Menyadari kesalahan

1. Agar terciptanya kondisi kesehatan jasmani maupun rohani bagi Tahanan sehingga memperlancar proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. .

1. Guna meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan
2. Untuk meningkatkan intelektual
3. Menumbuhkan kualitas perilaku
4. Memberikan peningkatan keterampilan atau profesionalisme
5. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.⁵⁸

⁵⁸ Data Lapas Kelas IIB Mojokerto

3. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan

Selain itu pula ada beberapa kegiatan yang ikut ditiadakan demi meminimalisir adanya penyebaran *Covid-19* antara lain adalah adanya pengajian yang biasanya mengundang salah satu sumber dari luar namun sejak *Covid-19* ini para tahanan melakukan pengajian sendiri dengan narasumber dari sosial media, meniadakan untuk melakukan sidang di pengadilan lalu menggantinya dengan sidang via *online* yang disediakan oleh pihak Lapas, serta membatasi kegiatan yang awalnya dilakukan secara bersama-sama dengan melakukannya secara bergantian.

⁵⁹ Data Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Tabel dibawah ini merupakan data Narapidana yang menjalani asimilasi di rumah per Tanggal 2 April 2020 Sampai Dengan 16 Desember 2020 dengan total keseluruhan ada 322 jiwa.⁶¹

Nomor	NAMA	PASAL	PIDANA	TANGGAL ASIMILASI DI RUMAH
1	AIYUB YANUAR RIHANANTO bin ROI	197 UU RI No. 36 Th 2009	2 Th, Denda. Rp. 50.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
2	PURNOMO als. MBOK PUR bin RAJI	112 ayat 1 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th., Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
3	ACHMAD MUSLIMIN bin SUWITO	197 UU RI No. 36 Th 2009	2 Th., dengan Denda. Rp. 250.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
4	MUHAMMAD IRFAN bin MULYONO	127 (1) UU RI No. 35 Th 2009	2 Tahun 6 Bulan	2 April 2020

⁶¹ Data Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

5	MOKHAMMAD FURKHON ARI BIN Ah. YUNUS	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th. dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
6	RACHMAD KUSNANDAR bin SURATMIN	36 UU RI No. 44 Th 2008	1 Tahun 6 Bulan, Denda. Rp. 20.000.000,00 dan Subs. 1 Bulan	2 April 2020
7	SUGIANTO bin SAMIN	372 KUHP	2 Tahun	2 April 2020
8	BAGUS SAMBODO bin MUNAJAK	81(2) UU RI No. 35 Th 2014	5 Th. Denda. Rp. 60.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
9	SUKADI bin SANDRI	351 KUHP	1 Tahun 10 Bulan	2 April 2020
10	MIFTAHUL FAHAMSYAH bin KADAM	112(1) UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun dengan Denda. Rp. 1.000.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
11	AMIN ZAKARIYA bin SULAIMAN	197 UU RI No. 36 Th 2009	1 Tahun, Denda. Rp. 50.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
12	NASIKIN bin M RIFAI	372 KUHP	1 Tahun 3 Bulan	2 April 2020
13	SUWARDI als. PEDET bin PAIRAN	81(2) UU RI No. 35 Th 2014	7 Tahun, Denda. Rp. 50.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
14	ARIE RAYMOND FIRMANSYAH	372 KUHP	5 Tahun 6 Bulan	2 April 2020
15	SUGENG TRIYONO bin ASMARI	76 UU RI No. 35 Th 2014	10 Bulan	2 April 2020
16	DODIK ALI WARDHANA	76 UU RI No. 35 Th 2014	10 Bulan	2 April 2020
17	ALI USMAN bin PONAJI	127(1) UU RI No. 35 Th 2009	1 Tahun 3 Bulan	2 April 2020
18	NANANG WAHYU bin LUKMAN	114 ayat 1 UU No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda Rp. 800.000.000,- dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
19	BAGAS PRASETYA BUDI	114 ayat 1 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th., Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
20	ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin HUSIN ALATAS	378 KUHP	2 Tahun 3 Bulan	2 April 2020
21	DEDI TRI AGUS SETIAWAN	112(1) UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda Rp. 800.000.000,- Subs. 3 Bulan	2 April 2020
22	EKO TUGAS SAPUTRO	378 KUHP	1 Tahun 4 Bulan	2 April 2020

23	ANITA binti SOEWONO	363 KUHP	10 Bulan	2 April 2020
24	NUR CHOLIS bin SAMIAN	42 UU RI No. 36 Th 1999	8 Bulan, Denda Rp. 50.000.000,00 Subs. 2 Bulan	2 April 2020
25	WARIYONO bin SINGKONO	114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009	4 Tahun dengan Denda Rp. 800.000.000,- Subs. 1 Bulan	2 April 2020
26	FACHRUL EFENDI bin MUHAMAD JAEANI	114 (1) UU RI Nomor 35 Th. 2009	4 Th., Denda Rp. 800.000.000,- Subs. 3 Bulan	2 April 2020
27	KHOIRUL ANAM bin JEMADI	112 UU RI Nomor 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	3 April 2020
28	AGUS TRIYONO BIN ACHMAD KHOIRI	112 UU RI No. 35 Tahun 2009	4 Th., Denda. Rp. 800.000.000,00 Subsidaer 3 Bulan	3 April 2020
29	HERU ISWANTO BIN KARIYANTO	363 (1) KE 4,5 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
30	SUDIRNO BIN PAIBAN	372 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
31	IMAN SYAKRONI BIN ABU MAALI (Alm)	197 UU RI No. 36 Th 2009	8 Bulan, Denda Rp. 800.000.000,00 Subs. 2 Bulan	3 April 2020
32	AKHMAD ABDUL FATAH BIN MUH. SULAIMAN	112 UU RI No. 35 Th 2009	3 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
33	LIGA PRAMANA PUTRA BIN MOSADIK	363 (1) ke-3 dan 5 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
34	NURHAJI BIN BAKIR	363 (1) ke-3 dan 5 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
35	AKHMAD KHUZAYNI BIN KASMARI	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
36	AGUS ADI GUNAWANTO BIN MISKAN	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
37	AHMAD SA'I BIN ABDUL ROKHIM	351 (1) KUHP	10 Bulan	3 April 2020
38	TRI ADI ALFIANTO BIN SUYONO	112 UU RI No. 35 Th 2009	3 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	3 April 2020
39	DADING WIJANARKO BIN SANUSI	378 KUHP	1 Tahun 6 Bulan	3 April 2020
40	MOCHAMAD ANIPAM BIN SAPI'I	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020

C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi

Dalam pemberian asimilasi syarat dan tata caranya dilakukan melalui sistem informasi pasyarakatan ini telah dijelaskan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020. Sistem informasi pasyarakatan yang dimaksud adalah sistem yang saling berkaitan antara pelaksanaan teknis pasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal. Apabila melalui sistem informasi pasyarakatan tidak dapat melakukan proses pemberian asimilasi ini, maka pemberian asimilasi oleh Kepala Lapas/LPKA dapat dilakukan secara manual. Selanjutnya petugas yang berwenang melakukan pendataan terhadap narapidana yang diajukan untuk memperoleh asimilasi. Pendataan tersebut berupa terpenuhinya syarat untuk memperoleh asimilasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Kelengkapan dokumen tersebut wajib dipenuhi paling lama 1/3 masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas dan 3 bulan sejak Anak berada di LPKA. Selanjutnya tim pengamat pasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi, maka Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi. Dalam hal penerbitan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah lalu kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pasyarakatan. Terdapat pengecualian bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi
3. pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
4. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 7

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
4. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

g o
tro
a 5
me
ap
ana
ter
tro
ng
ter
ak
a
hur
am
bid
B
pe
nga
pat

Di lapas Mojokerto sendiri berdasarkan data diatas telah memberikan asimilasi kepada 322 narapidana dengan berbagai jenis tindak pidana. Namun ada beberapa jenis tindak pidana yang mendapat pengecualian dalam pemberian asimilasi ini antara lain kejahatan teroris, pelanggaran HAM yang berat, narkoba dan prekursor, korupsi, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, serta kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan bagi warga negara asing juga tidak mendapatkan asimilasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor serta psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang memperoleh hukuman dengan masa pidana penjaranya maksimal 5 tahun. Dalam proses pemberian asimilasi ini pihak Lapaslah yang mengurusnya namun ada beberapa berkas dan penjamin yang juga harus dipenuhi oleh calon narapidana yang akan memperoleh asimilasi.

[illegible]

1. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal proses pemberian asimilasi terhadap narapidana ini seluruhnya diurus oleh petugas Lapas, narapidana hanya dimintakan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi serta memberikan alamat penjamin ketika ia bebas dan dikembalikan kembali ke masyarakat. Proses asimilasi ini pun tidak memerlukan waktu yang lama, apabila dokumen persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi cukup membutuhkan waktu satu hari saja dalam pengurusannya setelah itu narapidana bisa bebas karena asimilasi.

Dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi *Covid-19* ada faktor-faktor yang membuat sedikit kesulitan dalam prosesnya. Saat diwawancarai Bapak Andik menuturkan terkait hambatan apa saja yang dialami selama proses pemberian asimilasi bagi Narapidan diantaranya:⁶⁴

64 Ibid.

[illegible]

1. Mewajibkan adanya salah satu dari keluarga untuk narapidana yang bebas karena program asimilasi terkait *Covid-19*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, sehingga pihak Lapas mewajibkan untuk tiap narapidana dijemput oleh penjamin mereka. Selain itu, penjamin yang menjemput juga diwajibkan membuat sebuah Surat Pernyataan Keluarga, yang didalamnya berisi bahwa mereka sanggup untuk melakukan pengawasan kepada narapidana, memastikan bahwa narapidana berada di tempat tinggal tersebut selama pengawasan, serta menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi suatu tindak pidana lagi.
2. Melakukan pengawasan terhadap narapidana yang bebas melalui asimilasi *Covid-19*. Setelah narapidana bebas, pihak Lapas masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik dilakukan langsung dengan mengunjungi rumah narapidana, atau secara tidak langsung dengan menghubungi nomor telepon untuk narapidana atau keluarga yang telah dicatat untuk melakukan komunikasi. pada umumnya Pihak Lapas yang melakukan pengawasan biasanya dilakukan oleh Bapas yakni khusus pada Bagian Pengawasan yang pastinya mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan. Namun, karena minimnya anggota Bapas maka pengawasan pun dapat dilakukan oleh petugas semua petugas Lapas tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan sekitar tempat tinggal narapidana.

[illegible]

pemberian asimilasi ini prasangka negatif masyarakat akan pemberian asimilasi dimasa pandemi ini tidak terbukti secara signifikan hanya beberapa sebagian kecil saja dengan presentase kurang dari 1%.

Terdapat lima belas narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah dibebaskan ditengah pandemi *Covid-19* sebagaimana catatan dari Komnas HAM. Komnas HAM berharap agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana di tengah masyarakat, apabila ditemukan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana yang bebas melalui asimilasi di masa pandemi *Covid-19*, akan diberikan sanksi yang maksimal dengan pemberatan hukuman. Oleh karena itu, dengan narapidana adanya narapidana yang telah dibebaskan kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka peran Bapas harus lebih ditingkatkan.⁶⁶

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 4 bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah wadah untuk melaksanakan bimbingan kepada warga binaan yang mempunyai fungsi untuk membantu, mengawasi dan membimbing warga binaan yang memperoleh asimilasi. Dalam melakukan pengawasan tersebut dapat secara *online* misalnya berkomunikasi melalui *video calling* dan *whatsapp/telegram* yang bertujuan untuk menjaga program asimilasi ini. Jumlah anggota Bapas yang terbatas, maka dilakukan kerjasama dengan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian mempunyai instrumen hingga ke tingkat desa atau dusun sehingga dapat membantu membagikan informasi terkait alamat rumah narapidana yang sedang menjalani asimilasi. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan mengenai data narapidana yang dibebaskan sehingga dapat dilakukan upaya preventif oleh kepolisian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kembali.⁶⁷

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dikeluarkan untuk mengatur adanya pemberian hak warga binaan ini dimasa pandemi *Covid-19* terutama asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara membaurkannya kepada masyarakat. Walaupun pada awalnya terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait program asimilasi narapidana ini namun dengan memperhatikan pertimbangan terkait dampak positifnya, program ini tetap dijalankan. Salah satu latar belakang

⁶⁶ Annissha Azzahra Wurnasari,Dkk., Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19, *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 2020, 25

⁶⁷ Ibid., 24

Demi membantu terlaksananya peraturan ini pihak lapas Kelas IIB Mojokerto juga mempermudah proses pemberian asimilasi ini dengan cara membantu pengurusan berkas-berkas oleh narapidana untuk memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila ada narapidana yang tidak mengerti harus melakukan apa maka petugas Lapas yang mengurusnya. Namun, syarat-syarat yang terdapat pada peraturan tersebut harus benar-benar dipenuhi tanpa terkecuali. Sehingga tujuan utama dikeluarkannya peraturan tersebut berjalan dengan semestinya dan tidak menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan terkait pemaafan dalam perspektif Hukum Islam bahwa pemaafan dalam hukum islam artinya memberikan maaf dari korban atau keluarga korban kepada pelaku tindak pidana, bahkan pemaafan ini dapat membatalkan hukuman bagi pelaku. Dalam hukum islam telah dikenal dan diterapkan pemaafan atau pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku

Dalam kitab suci al-Quran yakni sebagai sumber hukum utama bagi umat muslim yang merupakan mukjizat dari Rasulullah telah mengatur dengan jelas prinsip pemaafan. Selain diatur dalam al-Qur'an, pemaafan juga diatur di dalam Hadist Rasulullah. Pemaafan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah '*afwu* (pemaafan). Salah satunya pada QS. an-Nur ayat 22:

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Prinsip pemaafan yang telah diterapkan dalam hukum islam mempunyai keterkaitan dengan asimilasi yang diberikan kepada narapidana yang adalah salah satu hak warga binaan di Lapas. Dalam beberapa aspek memperlihatkan bahwa asimilasi juga merupakan salah satu bentuk dari adanya pengurangan sanksi pidana yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap narapidana yang telah melakukan

⁶⁹ Ibid., 74

dalam Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang berwenang memberikan pemaafan, jika pemberian asimilasi dilakukan oleh pihak penguasa atau pihak yang berwenang karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan proses hukumnya sedangkan pemaafan dapat diberikan sebelum adanya proses hukum. Namun, pemaafan pun dapat diberikan pada saat proses hukum apabila hakim atau pihak yang berwenang belum memberikan putusan lalu pihak korban memberikan maaf dan menghentikan proses hukum tersebut. Hal ini dilakukan dalam jenis tindak pidana tertentu, pun sama dalam hukum islam pemaafan diberikan pada jarimah tertentu. Asimilasi juga diberikan pada tindak pidana tertentu saja.

Berdasarkan penjelasan terkait penggolongan jarimah dan data-data terkait narapidana yang memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto pada bab sebelumnya maka dapat digolongkan beberapa jenis pidana tersebut ke dalam jarimah dalam perspektif Hukum Islam. Dalam hukum Islam jarimah yang hukumnya telah jelas diatur dalam al-Qur'an atau lebih dikenal jarimah *hudud* tidak dapat diberikan toleransi atau pemaafan. Hal ini disebabkan sanksi yang diberikan adalah hak Allah sehingga hukumannya tidak dapat dihapuskan oleh siapapun dalam hal ini orang yang menjadi korban atau oleh pihak yang berwenang/penguasa. Dalam hukuman *had* diperbolehkan adanya pemaafan apabila perkaranya belum diajukan kepada hakim atau penegak hukum, dan pelaku tindak pidana tersebut menyesali atas perbuatannya (bertaubat) selama dengan pemberian

Jarimah *qishas-diyat* dalam hukum islam pun dapat diberikan pemaafan, namun dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada korban/keluarga korban. Karena jarimah *qishas* merupakan jarimah yang hukumannya setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku tindak pidana. Misal dalam pembunuhan maka sudah seharusnya hukuman yang setimpal adalah pembunuhan pula, namun apabila dipandang secara umum hukuman ini sangat tidak manusiawi. Maka dalam al-Qur'an pun dianjurkan adanya hukuman selain pembunuhan yakni dengan membayar denda (*diyat*). Aturan tersebut diatur surat al-Maidah ayat 45 yang mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun, akan lebih mulia lagi apabila pihak korban/keluarga korban memberikan maaf tanpa adanya imbalan apapun. Dalam praktinya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang tergolong dalam jarimah *qishas-diyat* adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

⁷⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 131

perseorangan maka yang berhak memberikan maaf adalah perseorangan, sedangkan apabila jarimah yang dilakukan mempunyai keterkaitan dengan hak Allah, maka hakim atau penegak hukum yang dapat memberikan maaf atau pengampunan. Dalam praktinya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang tergolong dalam jarimah *ta'zir* adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur dan tindak pidana perjudian.

Dengan demikian dalam jarimah *ta'zir* mencerminkan bahwasannya dapat diberikan keringanan hukuman atau penghapusan hukuman, sanksi pidana yang diberikan dapat dari sanksi ringan seperti peringatan sampai pada sanksi yang terberat yakni hukuman mati disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan. Selanjutnya pemaafan pada jarimah ini dapat diberikan kapan saja baik sebelum kasusnya diproses di pengadilan maupun setelah mendapat putusan hakim, asalkan kemaslahatan masyarakat menuntut demikian, dengan bertaubat juga dapat menghapuskan pidana. Terkait sanksi yang akan diberikan baik jenis dan lamanya pelaksanaan pembedaan sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan baik pelaku maupun masyarakat.⁷¹

Para fuqaha sepakat bahwa pemaafan dalam jarimah *ta'zīr* haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, karena tujuan pemidanaan dalam islam adalah mengandung unsur pencegahan, pendidikan, dan pengajaran. Tujuan utama disyariatkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut para ahli usul fiqh, kemaslahatan ini dapat terwujud apabila lima unsur pokok yang ada pada setiap manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷²

Dengan mempertebal keimanan dan menambah katakwaan kepada Allah SWT serta menjalankan apa yang dianjurkan atau disunnahkan dapat menumbuhkan sifat saling memaafkan sesama umat muslim. Prinsip pemaafan merupakan prinsip yang sangat mulia, karena pemaafan dianjurkan bukan saja kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dianggap ringan akan tetapi juga kepada pelaku tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan. Allah SWT menyuruh agar setiap manusia khususnya

⁷¹ Ibid., 177

⁷² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam “Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2017), 59

A. Kesimpulan

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto terkait proses pemberian asimilasi, bahwasannya adanya pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* ini melatar belakangi adanya kebijakan baru sehingga ditetapkan sebuah aturan yang secara khusus mengaturnya yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah ini secara khusus bertujuan pencegahan dan meminimalisir penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatann khususnya Lapas Mojokerto. Selain itu latar belakang diundangkannya peraturan ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membahas kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar tanggap dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di suatu Lembaga Pemasyarakatan dan memberlakukan kebijakan adanya *social and physical distancing intens*. Oleh karena adanya kebijakan tersebut, perlu adanya pengurangan kapasitas di dalam Lapas salah satu caranya adalah dengan pemberian asimilasi ini. Dalam data yang diperoleh di Lapas Kelas IIB Mojokerto terbukti banyak narapidana yang memperoleh asimilasi sehingga kebijakan *social and physical distancing intens* dapat diterapkan.

2. Dalam hukum islam yakni *al'afwu* (pemaafan) memperoleh penjelasan bahwa adanya keterkaitan antara pemberian asimilasi dalam hukum islam. Walaupun tidak secara jelas menyebutkan bahwa dalam islam mengenal asimilasi bagi pelaku jarimah, namun di dalam kitab suci al-Qur'an dan hadis menjelaskan adanya sebuah prinsip pemaafan. Adapun asimilasi disini dapat diartikan sebagai pemaafan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaku tindak pidana ini dapat dibebaskan. Dalam aturan yang berlaku hanya tindak pidana tertentu saja yang memperoleh asimilasi, begitu juga dalam hukum islam hanya jarimah tertentu saja yang memperoleh pemaafan. Pada hakikatnya tujuan dari pemidaan dalam islam dan hukum positif adalah untuk kemaslahatan baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban kejahatan. Sehingga dalam pemberian hukuman pun tidak hanya memandang

sehatan guna menjaga kondisi kesehatan bagi narapidana yang masih dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Untuk setiap manusia khususnya umat muslim agar tetap mengutamakan maslahatan bersama apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Bagi penguasa yang berwenang memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku tetap memperhatikan Hak Asasi manusia dan bagi sesama umat muslim saling memaafkan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu merugikan.

sehatan guna menjaga kondisi kesehatan bagi narapidana yang masih dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Untuk setiap manusia khususnya umat muslim agar tetap mengutamakan maslahatan bersama apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Bagi penguasa yang berwenang memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku tetap memperhatikan Hak Asasi manusia dan bagi sesama umat muslim saling memaafkan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu merugikan.

- sehatan guna menjaga kondisi kesehatan bagi narapidana yang masih dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.
- Untuk setiap manusia khususnya umat muslim agar tetap mengutamakan maslahatan bersama apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Bagi penguasa yang berwenang memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku tetap memperhatikan Hak Asasi manusia dan bagi sesama umat muslim saling memaafkan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu merugikan.

- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Moh Khasan. Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan Volume 9 No. 1., *Jurnal at-Taqqadum*. Juli. 2017
- Mokhamad Khomsin Suryadi. 2018. “Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa’at*) Menurut Al-Mawardi” (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)
- Niyan Ati Trisnawati. Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) Volume 26 N0. 14. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Agustus. 2020
- Ratna Wati. 2020. *Merdeka Berpikir: Catatan Harian Pandemi Covid-19*. Surabaya: Unitomo Press
- Sitti Nur Aulia Insani. 2019. “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
- Sri Endah Wahyuningsih. 2010. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Subhani, Syaikh Ja’far. 2011. *Adakah Syafa’at dalam Islam Antara Pro dan Kontra*, Diterjemahkan dari buku asli Bahasa Arab “*Al-Syafa’ah*” Penerjemah Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah
- Umar Attamimi. 2013. *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam*. (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Islam/Syariah Uin Alauddin Makasar)
- Warul Walidin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
- <https://tafsirweb.com/9130-quran-surat-asy-syura-ayat-40.html>, diakses pada 22 Oktober 2021)
- <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020?tmpl=component&print=1>, diakses pada 2 Desember 2020
- <https://bphn.go.id/news/2020040911270059/BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19>, diakses pada 2 Desember 2020
- <https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html?m=1>, diakses pada 7 November 2020

